

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks perekonomian global, berbagai faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk peran perempuan dalam perekonomian. Perempuan yang diberdayakan secara optimal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.² Seiring dengan dinamika global dan tantangan pembangunan, salah satu isu yang menjadi sorotan adalah bagaimana kesetaraan gender berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pemberdayaan perempuan dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesetaraan gender merupakan tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya poin nomor 5 yang berbunyi “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan”.³

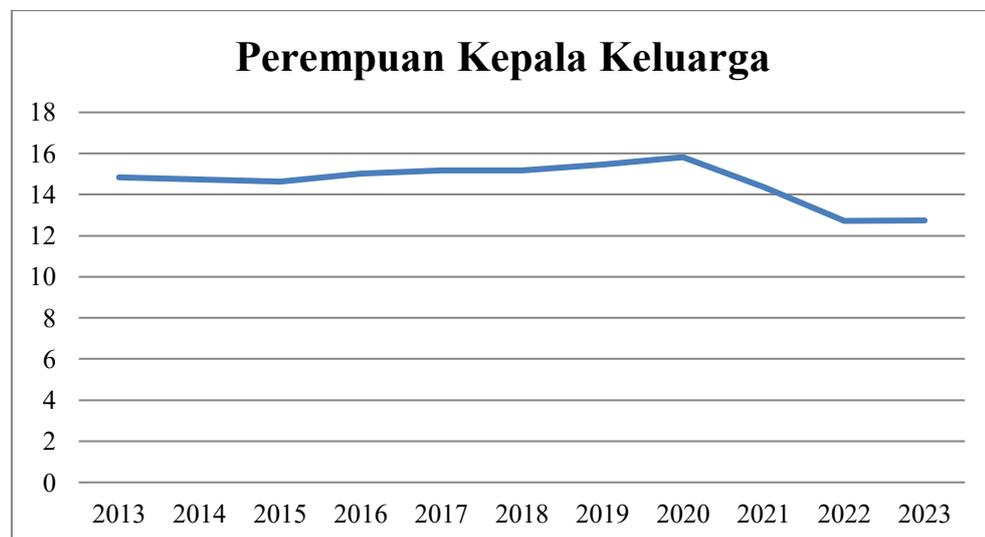
Perempuan yang jumlahnya hampir 50% dari total populasi Indonesia, memainkan peran penting dalam ekonomi yaitu sebagai tenaga kerja, pelaku bisnis, dan konsumen. Menurut Menteri PPPA, populasi perempuan yang hampir setara dengan populasi laki-laki memberikan peluang besar meningkatnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan di berbagai aspek

² Kemenkopmk RI, “Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan” dalam <https://www.kemenkopmk.go.id>, diakses pada 09 September 2024

³ BPS Gorontalo, “Ketimpangan Gender dan Ekonomi Inklusif Provinsi Gorontalo” dalam <https://gorontalokota.bps.go.id>, diakses pada 09 September 2024

kehidupan.⁴ Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga secara signifikan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dalam suatu negara.

Dalam konteks ini, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan keberadaan perempuan sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga menjadi sangat penting. Kedua aspek ini tidak hanya mencerminkan tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, namun juga sejauh mana kesetaraan gender tercapai dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan kepala keluarga di Indonesia menunjukkan tren peningkatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023.

Gambar 1.1 Persentase Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia Tahun 2013-2023

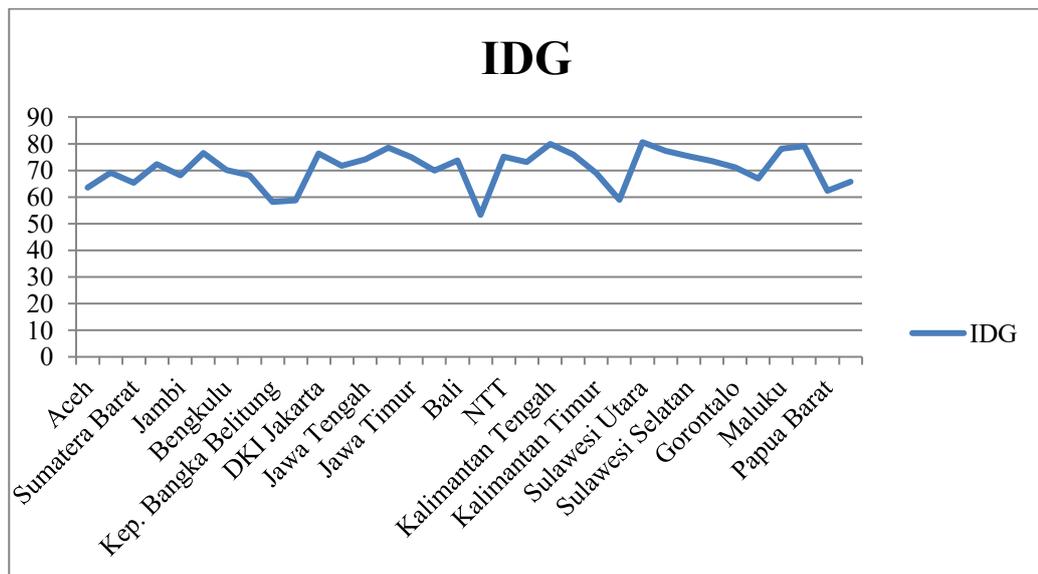
⁴ KemenPPPA RI, “Menteri PPPA: Pimpinan Daerah adalah Ujung Tombak Pengampu Isu Perempuan dan Anak” dalam <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 09 September 2024

Pada tahun 2023, proporsi rumah tangga di Indonesia yang dikepalai oleh perempuan diperkirakan mencapai 12,73%. Persentase ini sedikit meningkat sebesar 0,01% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,72%, seperti yang terlihat dalam gambar grafik di atas. Hal ini dapat dimaknai sebagai pergeseran dinamika sosial, di mana perempuan semakin mengambil peran strategis dalam mengelola sumber daya ekonomi keluarga. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mencakup dimensi ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan, menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana perempuan memiliki akses dan peluang yang setara dalam pembangunan.

Pemberdayaan gender merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, pemberdayaan gender diukur dengan menggunakan berbagai indikator, salah satunya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS), adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan politik serta mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di berbagai sektor.⁵ Tingginya IDG di suatu wilayah menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih baik dalam kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

⁵ Badan Pusat Statistik, “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)” dalam <https://lampung.bps.go.id/>, diakses pada 09 September 2024

Di Indonesia, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesetaraan gender. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IDG menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda di setiap provinsi di Indonesia, seperti yang terlihat pada gambar grafik di bawah ini



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023.

Gambar 1.2 Variasi IDG di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2023

Grafik tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara provinsi-provinsi dengan IDG yang tinggi dan rendah, menunjukkan bahwa pemberdayaan gender belum merata di seluruh Indonesia. Dari sisi pemerataan, perbedaan IDG yang signifikan antara berbagai provinsi mengindikasikan bahwa perempuan di daerah tertinggal masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri PPPA yang menyatakan bahwa di daerah yang memiliki budaya patriarki

yang kental seperti Indonesia, perempuan umumnya tertinggal dari laki-laki dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.⁶ Ketimpangan ini dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

IDG Indonesia terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat disparitas yang cukup signifikan antar provinsi. Pada tahun 2023, IDG Indonesia berada di angka 76.90%, meningkat dari sebelumnya sebesar 76.59% pada tahun 2022. Meskipun hal ini menunjukkan peningkatan dalam kesetaraan gender, tetapi masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam partisipasi perempuan, khususnya partisipasi di pasar tenaga kerja formal dan posisi kepemimpinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja formal pada tahun 2023 hanya 35,75% dibandingkan laki-laki yang sebesar 44,19%. Begitupun, partisipasi perempuan pada posisi parlemen atau kepemimpinan yang hanya 22,14% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena stereotip gender yang menganggap perempuan tidak kompeten untuk posisi kepemimpinan, sehingga berdampak pada rendahnya keterwakilan mereka dalam posisi manajerial dan profesional.

Menurut Menteri PPPA, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangat bergantung pada peran aktif seluruh masyarakat, termasuk perempuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ulfianna pada

⁶ Widuri Aftika Rahman, “Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Perempuan yang Pernah Mengakses Internet dan Persentase Penduduk Perempuan Terhadap Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi di Pulau Kalimantan”, *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 12 (2), hlm. 2

tahun 2021, peningkatan pada pemberdayaan perempuan dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan pendapatan keluarga, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.⁷

Pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi. Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penelitian dari *McKinsey Global Institute* menemukan bahwa kesetaraan gender di pasar tenaga kerja dapat menambah PDB global hingga 12 triliun USD pada tahun 2025.⁸ Sementara menurut *World Bank* pada tahun 2020, dengan mengurangi ketimpangan gender dalam angkatan kerja Indonesia, akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 9% pada tahun 2025.⁹ Hal ini selaras dengan penelitian dari *International Monetary Fund*, yang menunjukkan bahwa mempersempit kesenjangan gender di pasar tenaga kerja dapat meningkatkan PDB di negara-negara berkembang sebesar hampir 8%.¹⁰ Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo juga menunjukkan bahwa kesetaraan gender yang lebih baik

⁷ Vinna Ulfianna, dkk., “Peran Perempuan dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Kelompok Wanita Tani Kenangadi Kampung Sukajawa Lampung Tengah)”, *JGSA*, 3 (1), hlm. 63

⁸ *McKinsey Global Institute*, “*The Power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add \$12 Trillion to Global Growth*” dalam <https://www.mckinsey.com>, diakses pada 09 September 2024

⁹ Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, *Kajian Pengarusutamaan Gender: Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah*, (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, 2022), hlm. 14

¹⁰ *European Investment Bank*, “*The Economic Power of Gender Equality*” dalam <https://www.eib.org>, diakses pada 09 September 2024

(ketimpangan yang lebih rendah) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.¹¹ Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, pada gilirannya juga akan meningkatkan produktivitas dan inovasi di seluruh sektor ekonomi.

Pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi juga diakui oleh *World Economic Forum* (WEF), yang dalam laporan *Global Gender Gap Report 2023* mencatat bahwa kesetaraan gender dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dan mencapai kesetaraan gender dalam posisi kepemimpinan, baik di dunia bisnis maupun pemerintahan, merupakan dua kunci untuk mengatasi kesenjangan gender yang lebih luas dalam rumah tangga, masyarakat, dan perekonomian.¹² Seperti penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu dan Marlina pada tahun 2022 juga menyebutkan bahwa negara-negara dengan tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Penelitiannya sejalan dengan studi pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Jayasuriya dan Paul, yang menemukan bahwa negara-negara dengan jumlah perempuan yang lebih tinggi di posisi parlemen atau kepemimpinan ternyata mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa dekade terakhir.¹³

¹¹ BPS Gorontalo, “Ketimpangan Gender dan Ekonomi Inklusif Provinsi Gorontalo” dalam <https://gorontalokota.bps.go.id>, diakses pada 09 September 2024

¹² *World Economic Forum*, “*Global Gender Gap Report 2023*” dalam <https://www.weforum.org>, diakses pada 09 September 2024

¹³ Febiola Napitupulu dan Marlina Ekawaty, “Ketimpangan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus pada Negara-negara Asia Timur dan Pasifik”, *Journal of Development*

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Dalam Islam, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki fondasi yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam ekonomi Islam, pemberdayaan gender bukan hanya tentang meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian, namun juga memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan prinsip keadilan (*adl*). Islam mengedepankan pemberdayaan perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan (*maslahah*).¹⁴ Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi Islam dipandang sebagai bagian dari *maqashid syariah*, yaitu upaya mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ekonomi Islam menekankan pentingnya memberikan kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan partisipasi sosial. Prinsip ini tercermin dalam *Maqashid Syariah* (tujuan syariah) yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kekayaan (*hifz al-mal*)¹⁵, yang relevan dengan hak-hak perempuan dalam partisipasi ekonomi. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 32, Allah SWT berfirman:

Economic and Social Studies, 1 (1), hlm. 40

¹⁴ Azharsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), hlm. 261

¹⁵ Doni Fitriyanto, “Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kota/Kabupaten Wilayah Mataraman Jawa Timur ditinjau dari Maqasid Syariah”, *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 13 (2), hlm. 276

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ق
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ق وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa : 32)¹⁶

Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk berusaha dan berkontribusi dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Islam mendorong keadilan dalam distribusi kesempatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam konteks ekonomi, ayat ini dapat dimaknai bahwa perempuan juga berhak untuk berpartisipasi dalam perekonomian dan memperoleh hasil dari usaha mereka. Perspektif ini selaras dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, bahwa setiap individu, terlepas dari gendernya, memiliki hak yang sama untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi Islam tidak hanya sekedar kesetaraan gender, namun juga bagaimana perempuan dapat berkontribusi

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), hlm. 157-158

dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang merupakan bagian dari tujuan ekonomi syariah yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat.¹⁷ Memberi perempuan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perekonomian akan meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan dalam hal pemberdayaan perempuan tidak hanya selaras dengan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap kesetaraan gender semakin meningkat baik di tingkat global maupun nasional. Dalam konteks pembangunan Indonesia, upaya pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) melalui berbagai program pemberdayaan perempuan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan gender.¹⁸ Namun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama terkait dengan ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Merujuk pada laporan Kominfo RI mengenai isu tersebut, Maudy Ayunda pun ikut berpendapat bahwasannya negara harus memperhatikan perempuan dengan mengadopsi undang-undang yang mendukung kesetaraan gender dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya. Jika ini dilakukan, maka negara akan dapat

¹⁷ Siti Inayatul Faizah, "Strategi Dakwah Perempuan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi", *Ahsan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2 (2), hlm. 92

¹⁸ Kementerian Keuangan RI, "Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan" dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada 09 September 2024

mengalami kemajuan.¹⁹

Melihat pentingnya pemberdayaan gender dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian ini berfokus pada pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan perempuan kepala keluarga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia, khususnya dengan menganalisis 34 provinsi. Dengan menggunakan data terkini BPS dan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, penelitian ini akan melihat sejauh mana pemberdayaan perempuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini juga penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, khususnya untuk mengatasi kesenjangan antar provinsi dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan perempuan sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis berniat untuk menganalisis bagaimana pengaruh antara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan perempuan kepala keluarga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019-2023 dari perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender dan Perempuan Kepala Keluarga terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Data Panel di Indonesia Tahun 2019-2023”.

¹⁹ Kominfo RI, “Memberdayakan Perempuan, Membangkitkan Ekonomi” dalam <https://www.kominfo.go.id>, diakses pada 09 September 2024

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, sebagai berikut:

1. Sistem patriarki yang masih kuat di berbagai provinsi Indonesia membatasi pemberdayaan perempuan, mengurangi kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Kesenjangan antara target pemberdayaan gender dan realitas di lapangan menjadi hambatan utama dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender.
3. Partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan politik masih jauh lebih rendah daripada laki-laki, menghambat kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Masih jarang penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh IDG dan perempuan kepala keluarga terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dari perspektif ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan perempuan kepala keluarga secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2019-2023?

3. Bagaimana pengaruh perempuan kepala keluarga terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2019-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan perempuan kepala keluarga secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2019-2023.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh perempuan kepala keluarga terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2019-2023.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangsih ilmu ekonomi Islam khususnya mengenai hubungan antara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), perempuan kepala keluarga, dan pertumbuhan ekonomi dari perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan

tentang hubungan antara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), perempuan kepala keluarga, dan pertumbuhan ekonomi dari perspektif ekonomi Islam dan memperkaya literatur di bidang ini, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa pada umumnya dan terkhusus bagi mahasiswa program studi ekonomi syariah.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan data dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan pemberdayaan gender atau perempuan yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pencapaian SDGs.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu menyediakan data dan analisis yang berguna sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), perempuan kepala keluarga, dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks ekonomi Islam.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan perempuan kepala keluarga untuk dianalisis guna mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia tahun 2019-2023, dan juga dengan memasukkan perspektif ekonomi Islam. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai variabel X_1 ,

perempuan kepala keluarga sebagai variabel X_2 dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel Y . Seluruh variabel menggunakan data sekunder berupa data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019-2023, dengan populasi pada 34 provinsi di Indonesia.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan politik serta mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di berbagai sektor.²⁰

b. Perempuan Kepala Keluarga

Perempuan kepala keluarga menurut PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) adalah perempuan yang memenuhi peran dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah, pengurus rumah tangga, penjaga keberlangsungan hidup keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya.²¹

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Yasin (dalam Agusalim)

²⁰ Badan Pusat Statistik, “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)” dalam <https://lampung.bps.go.id/>, diakses pada 09 September 2024

²¹ PEKKA, “Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga” dalam <https://pekka.or.id>, diakses pada 20 November 2024

merupakan suatu perubahan yang terus-menerus dalam proses perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu, serta dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produktif suatu perekonomian yang tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional.²²

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian yang berjudul “Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender dan Perempuan Kepala Keluarga terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Data Panel di Indonesia Tahun 2019-2023” merupakan kajian untuk mengetahui pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan perempuan kepala keluarga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019-2023, dengan menganalisis 34 provinsi di Indonesia dan menggunakan perspektif dari ekonomi Islam.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

²² Lestari Agusalim, dkk., *Gender dan Pembangunan Ekonomi: Studi Lintas Provinsi di Indonesia*, (Malang: Madza Media, 2023), hlm. 49

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan berisi mengenai landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampel, dan teknik sampling; sumber data dan variabel penelitian; teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan berisi mengenai deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, dan temuan hasil penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisi penjelasan atau pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran.